



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019**

**SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR
INFRASTRUKTUR, KEBUMIHAN DAN KEBENCANAAN**

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR
INFRASTRUKTUR, PENILAIAN KESESUAIAN, PERSONAL
DAN EKONOMI KREATIF**

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan di Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Penilaian Kesesuaian Personal dan Ekonomi Kreatif pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2019, Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan sebagai bagian dari Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Penilaian Kesesuaian Personal dan Ekonomi Kreatif bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, di mana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Di samping itu, Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, 17 Januari 2020

Kepala Sub Direktorat Pengembangan
Standar Infrastruktur Kebumian dan
Kebencanaan



Tom Abbel Sulendro

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumihan dan Kebencanaan Tahun 2019 telah menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BSN Lainnya yang diamanatkan kepada Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumihan dan Kebencanaan.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumihan dan Kebencanaan tahun 2019 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian*)
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar lingkup Infrastruktur, Kebumihan dan Kebencanaan	1. Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan	59 SNI	51 SNI	86,44 %
	2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	14 rekomendasi	71 rekomendasi	100 %
	3. Presentase tindak lanjut PNPS	50 %	65 tindak lanjut PNPS dari total 88 PNPS aktif pada akhir tahun 2019 (74 %)	100 %
	4. Presentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95 %	115 tanggapan telah ditanggapi seluruhnya	100 %
Rata-rata capaian Tahun 2019				90.85 %

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100 %.

Dari 4 (empat) indikator kinerja pada Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumihan dan Kebencanaan, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak memenuhi target dan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang memenuhi target.

Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan antara lain:

1. Melakukan proses kajian pada PNPS yang diusulkan sehingga PNPS yang telah siap untuk dirumuskan yang akan diterima oleh KKPS.
2. Melakukan monitoring PNPS dan melakukan reminder pelaksanaan PNPS supaya segera naik tahapan menjadi rapat teknis dan rapat konsensus pada tahun berjalan.
3. Memastikan PNPS yang dilakukan perpanjangan pada tahun 2020 adalah PNPS yang belum selesai sampai proses penetapan SNI pada tahun 2019, sehingga tidak terjadi double input PNPS ke tahun depan dan tetapi akhirnya dibatalkan.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	4
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	6
I.2 Maksud dan Tujuan	6
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
I.4 Sumber Daya Manusia	8
I.5 Peran Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	9
II.1.1 Visi dan Misi	9
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	9
II.2 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	14
III.2 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja (<i>jika ada</i>)	24
III.3 Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	
Penutup	27
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumihan dan Kebencanaan, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumihan dan Kebencanaan memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumihan dan Kebencanaan merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif tahun 2019.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumihan dan Kebencanaan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif dengan tujuan sebagai berikut :

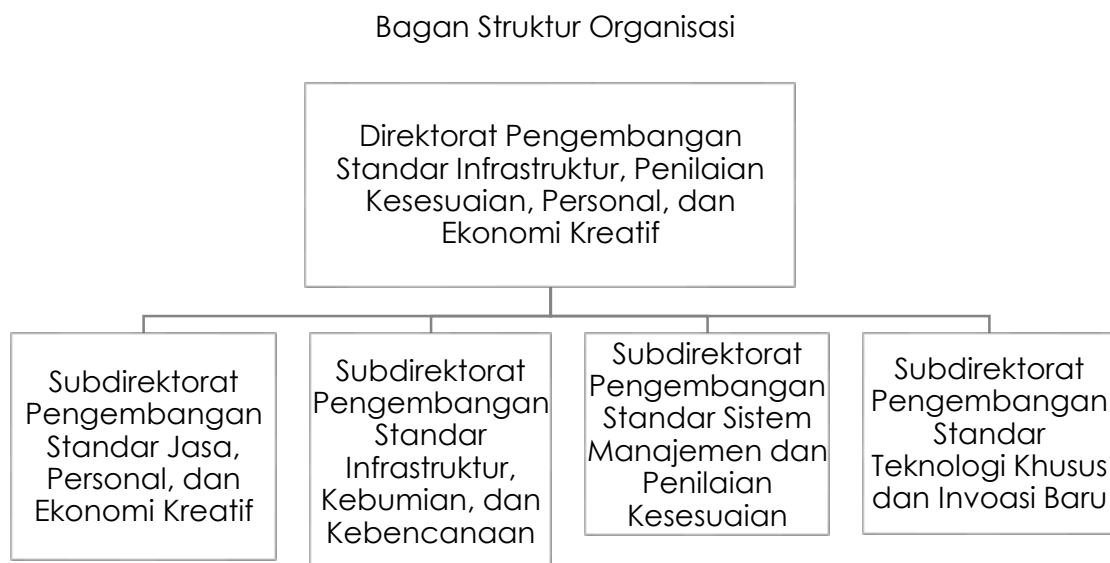
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan adalah melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, kebumian, dan kebencanaan.

Struktur Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1

Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Penilaian Kesesuaian Personal dan Ekonomi Kreatif

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2019 Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan memiliki personel berstatus

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 6 (enam) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1

Personel ASN Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan

No	Nama	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	
1.	Kasubdit Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan	-	1	-	1
2.	Analisis Perumusan SNI	-	3	2	5
Jumlah		-	4	2	6

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, kebumian, dan kebencanaan. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Rumusan visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif tahun 2019 mengikuti visi dan misi Pusat Perumusan Standar (PPS) BSN sesuai dengan RENSTRA Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi tahun 2015-2019. Hal tersebut mengingat tahun 2019 merupakan masa transisi dimana re-organisasi BSN baru selesai dilakukan yang merupakan akhir dari pembangunan nasional jangka menengah 2015-2019, sehingga Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari pemekaran unit PPS, pada tahun 2019 ini masih berkomitmen untuk melaksanakan visi dan misi berikut:

VISI

Terwujudnya proses perumusan SNI yang taat azas dan tepat waktu

MISI

1. Mengembangkan dan memperkuat sistem pengembangan SNI.
2. Menyempurnakan kebijakan pengembangan SNI.
3. Melaksanakan pengelolaan Komtek/SubKomtek pengembangan SNI.
4. Melaksanakan pembinaan Komtek/SubKomtek dan personel terkait dengan pengembangan SNI.
5. Memfasilitasi proses pengembangan SNI secara taat azas.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Direktorat

Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Jumlah SNI yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan

Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome. Pada tahun 2019, sasaran Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

SASARAN

Sesuai Renstra Tahun 2015-2019 Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif mempunyai sasaran yaitu **tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan, terkait sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif.**

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perspektif stakeholder: Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestic dan global

2. Perspektif proses internal: meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif
3. Perspektif learning dan growth: meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2019
Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan standar lingkup Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian	1	Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan	59 SNI
	2	Jumlah rekomendasi hasil kajian ulang SNI	14 rekomendasi
	3	Presentase tindak lanjut PNPS	50 %
	4	Presentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan pada tahun 2019 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Sub

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2019
Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan standar lingkup Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian	1	Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan	59 SNI
	2	Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	14 rekomendasi
	3	Presentase tindak lanjut PNPS	50 %
	4	Presentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95 %

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui:

1. Kegiatan: Peningkatan Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif (4181) yang akan menghasilkan output:

Output: 59 Jumlah SNI

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan Perumusan SNI bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif, yang terdiri dari:
 - a. Penyusun kebijakan
 - b. Pengendalian perumusan SNI
 - c. Pemeliharaan SNI
 - d. Pembinaan SDM perumusan SNI
 - e. Menyusun tanggapan SI dan partisipasi dalam sidang internasional.
2. Pengembangan SNI dari tahap PNPS sampai dengan rapat konsensus terdiri dari:

- a. Dokumen RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode republicasi – reprint dengan jumlah halaman 1 – 30
 - b. Dokumen RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan dengan jumlah halaman 1 – 30
 - c. Dokumen RSNI3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri dengan jumlah halaman 1 – 30
3. Pengembangan SNI dari tahap jajak pendapat sampai dengan penetapan terdiri dari:
- a. SNI yang disusun dengan adopsi identik metode republicasi reprint proses perumusan RSNI dari JP hingga penetapan SNI.
 - b. SNI yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan dari proses pelaksanaan jajak pendapat hingga penetapan SNI.
 - c. SNI yang disusun dengan metode pengembangan sendiri dari proses pelaksanaan jajak pendapat hingga penetapan SNI.



lembaga.

akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan Tahun 2019.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Peronal dan Ekonomi Kreatif, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan yang direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian*)
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar lingkup Infrastruktur, Kebumian dan Kebencanaan	1. Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan	59 SNI	51 SNI	86,44 %
	2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	14 rekomendasi	71 rekomendasi	100 %
	3. Presentase tindak lanjut PNPS	50 %	128 tindak lanjut PNPS dari total 166 PNPS (77,10%)	100 %
	4. Presentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95 %	115 tanggapan telah ditanggapi seluruhnya	100 %
Rata-rata capaian Tahun 2019				90.85 %

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan standar lingkup Infrastruktur, Kebumian dan Kebencanaan
----------------------	--

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019		
		Target	Realiasi	% *)
1. Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan	RASNI	59	51	86,44 %
2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	rekomendasi	14	71	100 %
3. Presentase tindak lanjut PNPS	%	50	77.10	100 %
4. Presentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	%	95	100	100 %
Rata-rata capaian Tahun 2019				90.85 %

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 90.85 % (dengan indikator Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan tercapai 86.44%, indikator Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI, Presentase tindak lanjut PNPS dan indikator Presentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar tercapai 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja salah satunya adalah jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 86.4 %.

Dalam merumuskan SNI, diharapkan kedepannya agar SNI yang dihasilkan dapat digunakan dan diaplikasikan untuk berbagai kegunaan yang dapat mendukung berbagai sektor strategis. Kegiatan pengendalian proses perumusan SNI ini merupakan kegiatan yang mendukung tercapainya output SNI yang berkualitas dan taat azas. Uraian capai Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan dapat dilihat pada Tabel III.3 di bawah ini.

Tabel III.3 Target dan realisasi jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan

URAIAN		Keterangan
Target Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan		59
Kategori menurut status penetapan SNI	Baru	26
	Revisi	15
	Konfirmasi	10
	Amendemen	0
	Ralat	0
Kategori menurut metode perumusan SNI	Identik republikasi reprint	0
	Identik terjemahan	10
	Modifikasi terjemahan	4
	Pengembangan Sendiri	37
Kategori menurut jenis SNI	Produk	22
	Jasa	0
	Proses	23
	Sistem	6
	Personil	0
Realisasi Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan		51

Dengan demikian target 59 RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan pada tahun 2019, Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan belum mampu mencapainya, dan hanya mampu tercapai sebesar yaitu 51 RASNI (86.446 %).

Berdasarkan data diatas maka terlampir adalah potensi permasalahan yang menyebabkan target RASNI yang diusulkan untuk penetapan menjadi tidak tercapai serta tindaklanjut yang dapat dilakukan dapat dilihat pada Tabel III.2 berikut:

Tabel III.2 Potensi dan Permasalahan Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan	<p>1. Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan pada tahun 2019 memiliki 166 PNPS yang diusulkan sepanjang tahun 2019 dengan komposisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 35 PNPS baru yang diajukan pada tahun 2019. - 117 PNPS merupakan perpanjangan dari tahun 2018 - 14 PNPS mendesak yang diajukan pada tahun 2019 - 78 dari 166 PNPS aktif tersebut dibatalkan dalam proses perumusan SNI sepanjang tahun 2019. <p>2. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019 Sub Direktorat Pengembangan Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan harus mencapai target jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan berjumlah 59 RASNI.</p> <p>3. Dari hasil perhitungan diperoleh data RASNI yang dihasilkan pada tahun 2019 berdasarkan PNPS yang diajukan pada tahun 2019 baik PNPS baru maupun PNPS perpanjangan berjumlah 36 RASNI, ditambah 10 RASNI hasil penetapan kaji ulang dengan rekomendasi tetap dari Komite Teknis 81-02, Industri Keramik dan 5 RASNI hasil dari PNPS mendesak Komite Teknis 91-01-S2, sehingga total RASNI yang dihasilkan adalah 51 RASNI</p> <p>4. Dari 166 PNPS yang diterima dari 12 Komite Teknis dibawah koordinasi Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan pada tahun 2019 terdapat beberapa kendala yang menghambat proses perumusan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada Komite Teknis sektor pekerjaan umum, rapat konsensus banyak dilakukan pada akhir tahun sehingga penetapan mundur menjadi tahun 2020. - Pada Komite Teknis 91-01-S4 terdapat 2 usulan PNPS mendesak yang seharusnya bisa dilaksanakan rapat konsensus pada tahun 2019 tetapi menjadi tidak dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran. - Adanya wacana reorganisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan 	<p>1. Melakukan proses kajian pada PNPS yang diusulkan sehingga PNPS yang telah siap untuk dirumuskan yang akan diterima oleh KKPS.</p> <p>2. Melakukan monitoring PNPS dan melakukan reminder pelaksanaan PNPS supaya segera naik tahapan menjadi rapat teknis dan rapat konsensus pada tahun berjalan sesuai dengan waktu perumusan SNI yang telah ditentukan.</p> <p>3. Memastikan PNPS yang dilakukan perpanjangan pada tahun 2020 adalah PNPS yang belum selesai sampai proses penetapan SNI pada tahun 2019, sehingga tidak terjadi</p>

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	<p>perumahan Rakyat sehingga masing – masing Pusat yang berada dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak banyak melakukan kegiatan perumusan standar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat banyak usulan pembatalan PNPS pada tahun 2019 yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat 78 PNPS dari 166 PNPS yang diusulkan pada tahun 2019 telah dibatalkan dalam proses perumusan SNI sepanjang tahun 2019 sehingga tersisa hanya 88 PNPS aktif sampai akhir tahun 2019. Dengan rincian pada berikut. ➤ 28 PNPS dari Komite Teknis di sektor Pekerjaan Umum yang sudah ditetapkan menjadi SNI pada tahun 2018, tapi masuk di pnps perpanjangan ke 2019. PNPS tersebut dibatalkan tetapi menjadi bahan dalam pembuatan rumusan Penetapan Kinerja Sub Direktorat Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan pada tahun 2019 sehingga merumuskan target 59 SNI. ➤ 3 PNPS dari Komite Teknis 13-08, Penanggulangan Bencana yang dibatalkan karena Komite Teknis 13-08 memfokuskan anggaran untuk PNPS dengan judul Sistem peringatan dini bencana berbasis komunitas – Umum, selain itu 3 PNPS yang dibatalkan tersebut masih dalam tahap perumusan oleh Konseptor dan belum siap untuk dibawa pada tingkat Komite Teknis. ➤ 1 PNPS dari Komite Teknis 79-02, Struktur Kayu yang dibatalkan karena 1 (satu) PNPS tersebut telah menjadi SNI pada tahun 2018. ➤ Pada bulan Oktober, terdapat 40 pembatalan PNPS dari sektor Pekerjaan Umum dikarenakan terdapat beberapa PNPS yang masih memerlukan klarifikasi sehingga ditunda perumusannya pada tahun 2019. ➤ Pada Komite Teknis 81-01, Industri Kaca terdapat 5 (lima) PNPS dibatalkan pada akhir tahun 2019 karena anggaran pada 	<p>double input PNPS ke tahun depan dan tetapi akhirnya dibatalkan.</p>

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	<p>Komite Teknis 81-01, Industri Kaca diprioritaskan untuk 3 (tiga) PNPS mendesak yaitu kaca pengaman untuk lokomotif dan kereta api, ampul gelas untuk obat suntik, vial gelas untuk obat suntik.</p> <p>➤ Pada Komite Teknis 91-02, Kimia Bahan Konstruksi terdapat 5 PNPS yang dibatalkan karena akan diakomodir menjadi 1 SNI dalam SNI 2049, <i>Semen Portland</i>.</p>	

2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI

SNI perlu dikaji ulang untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi; dan menilai kelayakan dan kekiniannya. Untuk menjaga keterkinian SNI, sesuai dengan praktek di internasional, kaji ulang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Dalam pelaksanaannya, perlu dilihat beberapa faktor untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi SNI tersebut, apakah SNI tersebut perlu diabolisi (jika tidak diperlukan lagi), tetap (jika masih sesuai), revisi (jika diperlukan perubahan yang cukup besar dalam substansinya), amandemen (jika hanya diperlukan sedikit perubahan substansi), serta ralat (jika terdapat kesalahan kecil misalnya kesalahan cetak). Beberapa faktor tersebut adalah: ketentuan pengembangan SNI yang ada, standar internasional yang tersedia, kesepakatan kerjasama regional (ASEAN) terkait harmonisasi standar, dan *national differences* apabila diperlukan.

Pada tahun 2019, kaji ulang SNI pada Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Kebumihan dan Kebencanaan dilakukan terhadap 71 SNI dari 3 Komite Teknis dan 1 SubKomite Teknis. Adapun rincian jumlah SNI yang dikaji ulang untuk masing-masing Komite Teknis pada Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Kebumihan dan Kebencanaan dapat dilihat pada Tabel III.4 berikut ini:

Tabel III.4 Target dan realisasi jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI

No	No. Komtek/ SubKomtek	Nama Komtek/ SubKomtek	Rekomendasi					Jumlah SNI
			Tetap	Revisi	Ralat	Amd	Abolisi	
1	07-01	Informasi Geografi dan Geomatika	29	18	0	0	2	49
2	81-01	Industri Kaca	10	0	0	0	1	11
3	91-01-S4	Bahan, Sains, Struktur dan Konstruksi Bangunan	0	0	0	0	1	1
4	91-02	Kimia bahan Konstruksi	3	2	0	0	5	10
TOTAL			42	20	0	0	9	71

Dengan demikian target 14 jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI pada tahun 2019, Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Kebumihan dan Kebencanaan telah mampu mencapainya, bahkan melebihi target yaitu 71 jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI (100 %).

3. Presentase tindak lanjut PNPS

Kegiatan pengendalian proses perumusan SNI ini merupakan kegiatan yang mendukung tercapainya output SNI yang berkualitas dan taat azas. Hal yang dilakukan antara lain dengan koordinasi dan penyelesaian masalah dengan Sekretariat Komite Teknis, pengelolaan Sekretariat dan Komite Teknis serta pengendalian proses perumusan SNI baik di rapat teknis maupun rapat konsensus. Adapun ketentuan yang digunakan dalam pengembangan SNI adalah Peraturan badan Standardisasi Nasional Nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman pengembangan Standar Nasional Indonesia.

Persentase tindak lanjut PNPS yang dikelola oleh Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumihan dan Kebencanaan dengan hasil dapat dilihat pada Tabel III.5

Tabel III.5 Status terakhir tindaklanjut PNPS menurut capaian tahapan perumusan

	PNPS	Ratek	Rakon	JP	SNI	Pembatalan PNPS	Total
07-01					8		8
13-08					2	3	5
13-11					2		2
79-02					2	1	3
81-01					5	5	10
81-02	1	1			13	1	16
91-01							0
91-01-S1	4	1			5	9	19
91-01-S2	8			1	7	10	26
91-01-S3		1			2	2	5
91-01-S4	25		7	1	3	42	78
91-02		1		1	2	5	9
Total	38	4	7	3	51	78	186

Dengan demikian target 50 % Presentase tindak lanjut PNPS pada tahun 2019, Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Kebumihan dan Kebencanaan telah mampu mencapainya, bahkan melebihi target yaitu 128 PNPS ditindaklanjuti dari total 166 PNPS atau jika dalam persen maka sebesar 77,10 % PNPS telah ditindaklanjuti. Sehingga target yang dicapai mencapai 100 %.

4. Presentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar.

Dalam PBSN Nomor 4 Tahun 2018 pada Pasal 5.e Tugas dan tanggungjawab Komite Teknis antara lain menyusun dan merumuskan tanggapan Indonesia terhadap draf standar internasional dan dokumen lain yang terkait pengembangan standar internasional. Berkaitan dengan hal tersebut maka presentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar yang dilaksanakan oleh Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumihan dan Kebencanaan dengan hasil dapat dilihat pada Tabel III.6

Tabel III.6 Status terakhir tanggapan Indonesia dalam TC/SC SDO

		CIB	NP	CD	DIS	FDIS	SR	DTR	Total
13-08 ISO/TC 292	Jumlah Balloting	20	5	5	7	1	4	1	43
	Jumlah Tahapan	20	5	5	7	1	4	1	43
79-02 ISO/TC 165	Jumlah Balloting	4	2	2	0	1	7	1	17
	Jumlah Tahapan	4	2	2	0	1	7	1	17
81-01 ISO/TC 160	Jumlah Balloting	4	1	1	1	0	1	0	8
	Jumlah Tahapan	4	1	1	1	0	1	0	8
81-02 ISO/TC 189	Jumlah Balloting	1	2	1	0	1	5	0	10
	Jumlah Tahapan	1	2	1	0	1	5	0	10
91-01-S3 ISO/TC 224	Jumlah Balloting	2	1	1	1	4	0	0	9
	Jumlah Tahapan	2	1	1	1	4	0	0	9
91-01-S4_ ISO/TC 71	Jumlah Balloting	4	5	1	6	7	5	0	28
	Jumlah Tahapan	4	5	1	6	7	5	0	28
91-02 ISO TC 74	Jumlah Balloting	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Tahapan	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		35	16	11	15	14	22	1	115

Dengan demikian target 95 % Presentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar pada tahun 2019, Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Kebumihan dan Kebencanaan telah mampu mencapainya, bahkan melebihi target yaitu dari 115 tanggapan yang disirkulasi kesemua tanggapan tersebut ditanggapi. Sehingga target yang dicapai mencapai 100%.

III.2 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan juga melakukan berbagai hal dalam upaya mencapai visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif antara lain:

1. Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan melalui Komite Teknis 13-08, Penanggulangan Bencana bersama expert dari UGM menjadi project leader ISO/DIS 22328-1, *Security and resilience — Emergency management — Part 1: General guidelines for the implementation of a community-based disaster early warning system*.
2. Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan melalui Komite Teknis 13-08, Penanggulangan Bencana bersama expert dari UGM menjadi project leader ISO 22327:2018, *Security and resilience — Emergency management — Guidelines for implementation of a community-based landslide early warning system*, dan pada sidang ISO/TC 292 tanggal 8 – 13 September di Bangkok disepakati oleh seluruh anggota ISO/TC 292 melalui WG 3 *Emergency management* bahwa ISO 22327:2018, *Security and resilience — Emergency management — Guidelines for implementation of a community-based landslide early warning system* akan direvisi dan akan diubah menjadi ISO 22328-2 karena akan menjadi bagian dari ISO/DIS 22328-1, *Security and resilience — Emergency management — Part 1: General guidelines for the implementation of a community-based disaster early warning system* dan akan direvisi dalam waktu 24 bulan dan tidak akan mengubah ruang lingkupnya.
3. Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan melalui Komite Teknis 13-08, Penanggulangan Bencana bersama expert dari BMKG sedang mengusulkan ISO 22328-3, *Security and resilience – Guidelines for the implementation of a community-based tsunami early warning system*, dan saat ini sedang dalam tahap pengusulan *initial draf International* ke sekretariat ISO/TC 292.
4. Pada pelaksanaan Evaluasi Kinerja Komite Teknis tahun 2019 diketahui terdapat 11 (sebelas) Komite Teknis yang lolos tahapan penilaian dan berhak mendapat sertifikat Komite Teknis dengan kinerja baik. Satu diantaranya adalah Komite Teknis dibawah pengelolaan Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan yaitu Komite Teknis 81-02, Industri Kaca.
5. Peningkatan kompetensi SDM pengembangan SNI dapat diberikan bagi stakeholder eksternal BSN untuk mendukung penyusunan kebijakan dan kegiatan perumusan standar serta peningkatan kinerja anggota Komite Teknis. Aktifitas yang dilakukan berupa workshop terkait pengembangan standar. Pada tahun 2019 Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumian dan Kebencanaan telah melakukan beberapa kegiatan pembinaan SDM dalam bentuk Workshop antara lain:

- a. Workshop Peningkatan pemahaman PBSN dan produk hukum lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diadakan di Bekasi pada tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan 1 Maret 2019 dengan peserta 30 orang.
- b. Workshop pelatihan perumusan SNI merupakan kerjasama dengan Komite Teknis 07-01 Informasi Geografi/Geomatika yang diadakan di Bogor pada tanggal 11 – 12 Maret 2019 dengan peserta 30 orang.

III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, pagu anggaran TA 2019 Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- yang kemudian direvisi karena adanya pengalihan program prioritas BSN, menjadi Rp 1.206.857.000,- yang digunakan untuk membiayai 7 (tujuh) kegiatan utama yang ada, dengan hasil capaian penyerapan anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar 99,85%.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif TA 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.7

Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif TA. 2019

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2019		%
		Pagu	Realisasi	
001.001	Rekomendasi Kebijakan Perumusan SNI bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	818,306,000	852,835,126	104%
001.002	SNI yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi-reprint proses perumusan RSNI dari JP hingga penetapan SNI	1,700,000	1,700,000	100%
001.003	SNI yang disusun dengan adopsi identik Metode terjemahan dari proses pelaksanaan jajak pendapat hingga penetapan SNI	9,400,000	9,400,000	100%
001.004	SNI yang disusun dengan metode pengembangan sendiri dari proses pelaksanaan jajak pendapat hingga penetapan SNI	24,665,000	24,665,000	100%

001.005	Dokumen RSNI 3 yang disusun dengan adopsi metode Republikasi-Reprint dengan jumlah halaman 1-30	16,555,000	16,555,000	100%
001.006	Dokumen RSNI 3 yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan dengan jumlah halaman 1-30	259,364,000	259,364,000	100%
001.007	Dokumen RSNI 3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri dengan jumlah halaman 1-30	76,867,000	76,867,000	100%
	Jumlah	1,206,857,000	1,241,386,126	100 %

Keterangan:

Realisasi pada Kode 001.001 dengan Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Perumusan SNI bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif lebih dari 100% karena terdapat pagu anggaran yang dipulihkan dari sisa PDLN sebesar Rp 36.357.623,-

Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumihan dan Kebencanaan Tahun 2019 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumihan dan Kebencanaan Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumihan dan Kebencanaan Tahun 2019, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% akan dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan antara lain:

1. Melakukan proses kajian pada PNPS yang diusulkan sehingga PNPS yang telah siap untuk dirumuskan yang akan diterima oleh KKPS.
2. Melakukan monitoring PNPS dan melakukan reminder pelaksanaan PNPS supaya segera naik tahapan menjadi rapat teknis dan rapat konsensus pada tahun berjalan.
3. Memastikan PNPS yang dilakukan perpanjangan pada tahun 2020 adalah PNPS yang belum selesai sampai proses penetapan SNI pada tahun 2019, sehingga tidak terjadi double input PNPS ke tahun depan dan tetapi akhirnya dibatalkan.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur Kebumihan dan Kebencanaan



BADAN STANDARDISASI NASIONAL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR INFRASTRUKTUR, KEBUMIHAN DAN KEBENCANAAN

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan standar lingkup Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian	1 Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan	59 SNI
	2 Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	14 Rekomendasi
	3 Presentase tindak lanjut PNPS	50%
	4 Presentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95%

Pihak Kedua

(Hendro Kusumo, SP)

Jakarta, Juli 2019

Pihak Pertama

(Ir. Tom Abbel Sulendro)